
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DALAM PERKEMBANGAN WABAH VIRUS COVID-19 DI KOTA PROBOLINGGO

Oleh
Siti Marwiyah¹⁾, Devi Putri Salvira²⁾
Peneliti Pada Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas PancaMarga
Email: 2devisalvira50@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dikhususkan untuk meneliti pengaruh kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat pada era pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Obyek penelitian adalah jumlah kasus yang ada di Kota Probolinggo pada saat pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan rentang waktu penelitian selama kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dari level 1 sampai level 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya jumlah covid yang ada di kota probolinggo mengalami penurunan juga demikian dengan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yakni berada di level 2.

Kata Kunci: Covid-19, Pemerintah, Kebijakan, Efektivitas.

PENDAHULUAN

Coronavirus adalah sekelompok virus dari sub famili Orthocoronavirinae di famili Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. di Tempat orang, virus corona biasanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti: masuk angin, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti; SARS, MERS dan COVID-19 lebih mematikan. Dalam keadaan saat ini, virus corona mungkin bukan epidemi diabaikan begitu saja. Jika melihat gejalanya, orang awam akan menganggap ini hal yang biasa. terbatas pada influenza biasa, tetapi untuk analisis medis virus ini cukup berbahaya. Saat ini di tahun 2020 perkembangan penularan virus ini cukup penting karena telah menyebar ke seluruh dunia dan semua negara menderita karenanya termasuk Indonesia. Antisipasi dan kurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia dilaksanakan di semua sektor. Diantaranya memberikan kebijakan batasi kegiatan di luar ruangan, kegiatan sekolah di rumah, pekerjaan rumah (pekerjaan rumah), kegiatan ibadah juga di rumah. Ini telah menjadi kebijakan

publik berdasarkan pertimbangan yang dianalisis maksimal tentunya. Dalam hal penghentian kegiatan, polisi tunduk pada persyaratan hal khusus untuk dilakukan. Kebijakan ini harus mampu menyelesaikan masalah itu terjadi di masyarakat. Kebijakan ini dikembangkan oleh beberapa pihak, antara lain: pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan Publik. Yang dimaksud dengan pelaksanaan suatu kebijakan publik adalah hubungan yang memungkinkan tercapainya tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan pemerintah. Kelemahan atau kesalahan dalam kebijakan publik akan diketahui setelah pelaksanaan ketertiban umum. Semoga berhasil implementasi kebijakan publik terlihat dari dampaknya hasil evaluasi implementasi suatu kebijakan. Kebijakan kesehatan dapat dianggap sebagai aspek penting dalam kebijakan sosial. Karena kesehatan adalah faktor penentu untuk status sosial. Orang sukses bukan hanya orang yang pendapatan atau perumahan yang memadai, melainkan orang yang baik dan sehat fisik dan mental. Di Inggris, Australia dan Selandia Baru, layanan Kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh sebuah lembaga yang

disebut National Health Service. Lembaga ini menawarkan perawatan kesehatan dasar gratis untuk hampir semua semua warga negara. melihat keadaan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), pemerintah Indonesia mulai menerapkan pembatasan dengan kebijakan social distancing (jaga jarak sosial, menghindari kerumunan), lalu physical distancing (jaga jarak antar orang minimal 1,8 meter) sejak awal Maret 2020 lalu dilanjutkan dengan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) pada april 2020 hingga PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) level 3 dan 4 menjelang akhir juli 2021. Kebijakan itu telah menurunkan secara drastis aktivitas dan pergerakan orang di Jabodetabek dan kota-kota besar. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah penumpang pada berbagai sarana transportasi mulai pesawat terbang, kereta api komuter, bus dan busway, angkot, taksi, taksi online, bajaj, hingga ojek dan ojek online (ojol).

Dari pemasalahan diatas munculah pertanyaan yang menjadi fokus penelitian yaitu : bagaimana perkembangan dan efektivitas kebijakan PPKM terhadap virus covid-19.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan teori Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian berikut metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif

yang digunakan sebagai penulisan dalam jurnal. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada dinas kesehatan Kota Probolinggo serta menggunakan instrumen penelitian dari sumber data yang berasal dari dinas kesehatan dan jurnal ilmiah, situs web resmi yang kemudian digambarkan melalui analisa deskriptif yaitu menggambarkan penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Probolinggo. Metode efektivitas yang digunakan dalam penelitian adalah keefektivitasan penerapan kebijakan PPKM dalam membatasi mobilitas warga sedangkan unit eksplanasinya adalah tinjauan Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021..

HASIL DAN PEMBAHASAN

PPKM merupakan singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. PPKM ini dilakukan untuk membatasi interaksi, pertemuan antara orang dengan orang dan kelompok dengan kelompok, yang diharapkan dapat mengurangi penyebaran dan penularan Covid-19. Meski demikian, PPKM bukanlah istilah aturan pembatasan sosial pertama yang digunakan oleh pemerintah. Sebelumnya, ada sebutan lain yang juga diperkenalkan pemerintah sejak awal pandemi Covid-19, yakni PSBB. Aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai diberlakukan 17 April 2020. Penggantian istilah dari PPKM Darurat menjadi PPKM level 3-4 tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali itu ditandatangani Mendagri Tito Karnavian pada Selasa (20/7/2021). "Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) Corona Virus Disease (Covid-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen dan untuk

melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah kota Probolinggo selama PPKM adalah Pemerintah Kota Probolinggo melakukan pemadaman lampu kota di malam hari sebagai bentuk upaya agar masyarakat membatasi mobilitas selama PPKM Darurat. Pemadaman lampu ini dilakukan sekitar pukul 19.00-06.00 WIB. Kegiatan pemadaman dilakukan untuk menunjang pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah Kota Probolinggo sehingga masyarakat bisa mengurangi aktivitasnya di malam hari. Biasanya setiap malam hari banyak masyarakat khususnya para pemuda berkumpul dan menimbulkan kerumunan, sehingga dengan pemadaman ini akan mengurangi kerumunan dan tidak keluar di malam hari pada lingkungan Kota. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong masyarakat agar disiplin selama penerapan PPKM.

Selain itu masa PPKM darurat membuat pemerintah Kota Probolinggo melakukan penutupan atau peralihan arus lalu lintas kota guna menghindari kemacetan dan kerumunan serta membatasi kegiatan masyarakat. Satgas penanganan covid-19 melakukan penyekatan pada beberapa akses menuju Kota. Diharapkan dengan berkurangnya mobilitas warga dapat menurunkan potensi penularan covid-19. Pembatasan ini perlu dilakukan karena melibatkan banyak orang dan seringkali warga tersebut tidak menggunakan masker. Juga dilakukannya pembatasan jam operasional supermarket atau toko swalayan dan kegiatan keagamaan. Dengan diterapkan kebijakan PPKM pemerintah Kota Probolinggo makin menguatkan Peraturan Walikota No 80 Tahun 2020 yang berisikan panduan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat umum. Pemerintah terus berupaya dengan pengawasan yang ketat pada tempat-tempat umum dan membatasi jam operasional termasuk mall,

tempat makan, restoran, rumah makan, cafe, warung makan, dan pedagang kaki lima diperbolehkan buka hanya sampai jam 9 malam. Dan telah dilakukan pengawasan ketat terhadap semua unit usaha tersebut. Setelah jam 9 malam akan dilakukan patroli oleh TNI/Polri dan Satpol PP dan jika tetap beroperasi melewati jam yang telah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi larangan berjualan.

Berdasarkan data Pantauan Covid-19 di Kota Probolinggo per tanggal 13 Juli 2021, diketahui kasus aktif ada sebanyak 248 kasus. Angka ini dinilai Wali Kota Habib Hadi sangat tinggi bila dibanding tahun sebelumnya. Dengan adanya aturan penerapan PPKM Darurat di Kota Probolinggo sejak 3 Juli lalu, Habib Hadi menyebutkan, langkah itu cukup efektif dirasakan. Terbukti, dari 321 kasus aktif pada tanggal 10 Juli lalu, angka ini menurun menjadi 248 kasus pada 13 Juli 2021.

Hasil akhirnya Kementerian Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 Corona Virus Disease (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali, memasukkan Kota Probolinggo dalam kategori PPKM Level 2 mulai tanggal 14 – 20 September 2021. Jadi berdasarkan pembahasan diatas bisa disimpulkan bahwasanya kebijakan PPKM ini dinilai efektif dalam mengurangi angka/kasus aktif covid-19, juga memberikan dampak yang positif terhadap pengurangan jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 80% angka kecelakaan menurun drastis.

PENUTUP

Kesimpulan

Kebijakan PPKM ini dinilai efektif dalam mengurangi angka/kasus aktif covid-19, Berdasarkan data Pantauan Covid-19 di Kota Probolinggo per tanggal 13 Juli 2021, diketahui kasus aktif ada sebanyak 248 kasus. Angka ini dinilai Wali Kota Habib Hadi sangat tinggi bila dibanding tahun sebelumnya. Dengan adanya aturan penerapan PPKM

Darurat di Kota Probolinggo sejak 3 Juli lalu, Habib Hadi menyebutkan, langkah itu cukup efektif dirasakan. Terbukti, dari 321 kasus aktif pada tanggal 10 Juli lalu, angka ini menurun menjadi 248 kasus pada 13 Juli 2021. Juga memberikan dampak yang positif terhadap pengurangan jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 80% angka kecelakaan menurun drastis.

Saran

Hal yang ingin peneliti sampaikan meskipun kota Probolinggo sudah memasuki PPKM level 2 diharapkan agar masyarakat tetap menerapkan prinsip 5M (Memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitasi dan interaksi) agar angka covid tetap terkendali.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Darmalaksana, W., & Garnasih, T. R. (2021). Pulih dari Covid melalui Psikologi: Studi Kasus PPKM Di Indonesia. *Pre-Print Kelas Menulis UIN* <http://digilib.uinsgd.ac.id/40765/>
- [2] Dilapanga, A. (2021). Responsivitas Pelayanan Publik Di Era Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang *Jurnal Administro: Jurnal Kajian* <http://ejurnal-mapalus-unima.ac.id/index.php/administro/article/view/2052>
- [3] Hidayat, D. W., Mardikawati, B., Oktopianto, Y., & ... (2021). Analisis Lalu Lintas Ruas Jalan Denpasar-Gilimanuk Tabanan Bali Masa Pandemi Covid 19. ... (*Indonesian Journal of* <http://ktj.pktj.ac.id/index.php/ktj/article/view/406>
- [4] Jalilah, D. L., & Efendi, M. R. (2021). Pendampingan Pembelajaran Anak Dari Rumah Pada Masa Ppkm Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa Di Desa Paneongan. In *PROCEEDINGS UIN SUNAN* proceedings.uinsgd.ac.id.
<https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/225>
- [5] Lesmana, I. S., Sari, N. N., Diyana, R., Safitri, S. Y., & ... (2021). SOSIALISASI PENTINGNYA KEPATUHAN DAN KEDISIPLINAN MASYARAKAT DI ERA PEMBERLAKUAN PEMBatasan KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM). ... *Journal of Community* <http://icjcs.esc-id.org/index.php/home/article/view/15>
- [6] Lestari, N. D., Kusbandrijo, B., & Murti, I. (2021). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Dalam Kegiatan Operasi Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian* <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/109>
- [7] Marwiyah, S., Yolanda, M., & Rizeki, K. (2021). ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERLAKUKAN PEMBatasan KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) TERHADAP KESEHATAN MENTAL MASYARAKAT KOTA In *Journal of Innovation Research and Knowledge*.
- [8] RUHYANA, N. (2021). IMPLEMENTASI NILAI KETAATAN HUKUM PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBatasan KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT DALAM RANGKA *Jurnal Kajian Lemhannas* RI. <https://prosiding.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/220>
- [9] Sari, W., Marwiyah, S., Puji, M., Melidia, M., & ... (2021). Evaluasi Kebijakan PPKM Level 4 Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo. *Jurpis: Jurnal* <https://jurnal.fkip.untad.ac.id/index.php/jurpis/article/view/1295>